INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17929-17938
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Model Implementasi Kebijakan Publik

Ahamd Fauzan[1✉]
Universitas Islam Sumatera Utara
Email : ahmadfauzan@fisip.uisu.ac.id[1✉]

Abstrak

Kebijakan Publik merupakan keputusan mengikat yang menjadi acuan dilakukan oleh organisasi pemerintah atau organisasi lainnya dan dapat memberikan solusi dalam menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat., karena kebijakan publik suatu keputusan yang menjadi pedoman dalam bertindak oleh organisasi pemerintah maupun organisasi lainnya memiliki tujuan, aktivitas dan laporan yang harus dipertanggungjawabkan kepada instansi maupun masyarakat/warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam pengambilan keputusan yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak setiap warga negara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Diskriptip kajian kepustakaan (library research). Dalam pelaksanaan Kebijakan publik diperlukan komitmen yang lebih kuat lagi dari para penyelenggara negara sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik pada pelaksanaannya sangat efektif dengan menggunakan teori Implementasi sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure).

Kata Kunci: *Model, Implementas, Kebijakan Publik*

Copyright @ Ahamd Fauzan

Abstract

Public Policy is a binding decision that becomes a reference for government organizations or other organizations and can provide solutions in answering problems that exist in society, because public policy is a decision that becomes a guideline for action by government organizations or other organizations that has a purpose, activities and reports that must be accountable to agencies and the public/citizens. This research aims to analyze public policy in decision making which can be a solution in resolving problems in society to fulfill the needs and rights of every citizen. The method used in this research is the descriptive research method of library research. In implementing public policy, a stronger commitment is needed from state administrators as parties who are given the authority to make decisions. Public policy in its implementation is very effective using Implementation theory as presented by Edward III. There are four variables in public policy, namely Communication. , resources, attitudes (dispositions or attitudes) and bureaucratic structure.

Keywords: *Model, Implementation, Public Policy*

PENDAHULUAN

Istilah kebijakan publik berasal dari kata Policy, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan sebagai acuan dalam melakukan tindakan oleh pemerintah sampai kepada pegawai terendah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dianggap sebagai respon dari sistem pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena dalam kebijakan publik terdapat antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan kata lain Kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. (Abdul Wahab:2005). Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat untuk pada akhirnya mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat (Setyanto, et.al, 2022). Sebagai anggota masyarakat pun penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik karena apa yang diatur di dalam kebijakan publik itu adalah kita, yang dalam artian singkatnya bahwa nasib kita ada di kebijakan publik. Jadi kebijakan publik juga diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik, karena kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara aatau system politik, dan administrasi. Sementara pemerintah adalah orang atau kelompok

Copyright @ Ahamd Fauzan

orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap sistem pemerintahan mulai dari level paling atas sampai bawah.

Dalam pengamilan kebijakan publik yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kemaslahatan masyarakat atau warga negara disahkan oleh pejabat negara yang dituangkan dalam lembar negara yang menjadi pedoman dapat mengikat antara hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011, 21), dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research). normatif yang mengkaji tentang model implementasi kebijakan publik dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara terhadap penyelesaian masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan dalam pengimplementasikan kebijakan sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para penyelenggara negara murai dari pimpinan sampai level pegawai yang paling bawah.

Dalam penelitian kebijakan publik ini mengupas tentang Konsep Kebijakan Publik sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti "government" yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga„governance" yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik dalam menyelesaikan persoalan yang ada ditengah-tengah masyarat.

Implementasi kebijakan menurut Eugane Bardach dalam Leo Agustini adalah cukup membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka angggap klien (Agustino, 2014:138). Grindle (Mulyadi, 2015:47),

Copyright @ Ahamd Fauzan

“menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dari beberapa denifisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan manyangkut pada tiga hal yaitu:

1. Kebikan publik mempunyai tujuan atau sasaran.
2. kebijakan publik adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil atau laporan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelakasana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. Pada sisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Winamo, 2001:144).

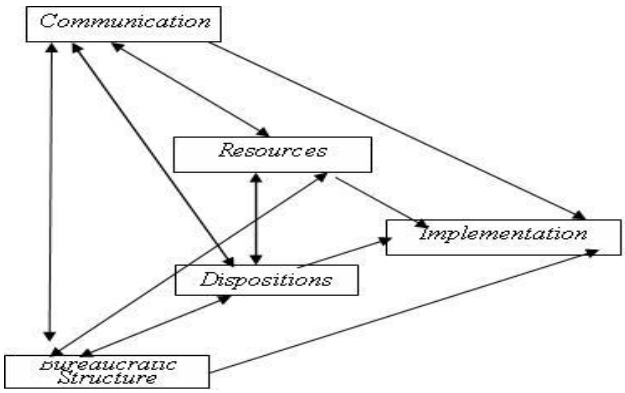
Kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil menjadi suatu aturan yang mengikat antara hak dan kewajiban setiap warga negara, kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh

Copyright @ Ahamd Fauzan

karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya Said Zainal Abidin (2004: 23). Dengan pengertian lainnya kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks, Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada Muhlis Madani (2011). Sedangkan Leo Agustino (2008: 6) mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal. Begitu juga yang disampaikan Roberty Eyestone (1971: 18) Pengertian kebijakan publik secara luas bisa dikatakan sebagai "hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas. Serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal. Dan Charles Lindblom (1968) Pembuatan kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Dimana tidak mengenal saat dimulainya atau diakhirinya. Serta batas-batas dari proses itu yang tidak pasti. Dalam penelitian ini membahas tentang Model Implementasi Kebijakan publik sebgaimana disampaikan oleh George Edward III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure).

Dari keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat tentang implementasi kebijakan.

Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi



Copyright @ Ahamd Fauzan

Adapun yang menjadi Faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang

Copyright @ Ahamd Fauzan

harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi

Copyright @ Ahamd Fauzan

program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

   Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil

Copyright @ Ahamd Fauzan

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk melihat tingkat akurasi penerapan kebijakan publik, ditelaah dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward III, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat sasaran, tepat lingkungan dan proses yang tepat untuk menerima efektivitas kebijakan sebagai misi bersama yang terjadi di lembaga penyelenggara negara. Sementara jika memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan menurut Edward III sebagai berikut : dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah

Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta. Charles E. Lindblom. The Policy-Making Process. Englewood: Cliffs, NJ: Printice-Hall, 1968.

Charles O. Jones. An Introduction to the study of public policy. Third Edition. Monterey: Books/Cole Publishing Company, 1984.

Edwards III, George C 1980. Implementing Public Policy Washington DC: Congresional Quarterty Press.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009 " Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program". Pustaka Cakra: Surakarta.

Eyestone, Robert. The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril. 1971.

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.

Leo, Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulyadi, Deddy, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,. Bandung : Alfabeta.

Copyright @ Ahamd Fauzan

Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Setyanto, Eddy., Sulhan, Muhammad., Nurranto, Heri, Kemal, Isthifa. 2022. Manajemen Organisasi dan Jaringan Sistem Pendidikan. *Jurnal Syntax Imperatif,* 2 (6). https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.125

Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.

Syahida, Agung, Bayu, 2014, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta

Taufik dan Isril, 2013, Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume.4, Nomor.2.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Winarno, Budi. 2003, Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Presindo. Jakarta

Copyright @ Ahamd Fauzan